

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) dalam pemberdayaan masyarakat di Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) dalam pemberdayaan masyarakat di Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi telah memenuhi dua tahapan pemberdayaan masyarakat. Dua tahapan tersebut meliputi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas masyarakat. Masyarakat sudah sadar dan memiliki keterampilan dalam mengelola sampah dan praktik *urban farming*. Namun pada tahap kemandirian dan keberlanjutan, program ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, dikarenakan masyarakat belum secara konsisten dan merata menerapkan praktik pemilahan sampah secara mandiri dan masih bergantung pada penjemputan sampah oleh operator, sementara itu skala penjemputan sampah mulai berkurang dikarenakan keterbatasan dana operasional berkelanjutan yang disediakan oleh DLH Kota Bukittinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) dalam pemberdayaan masyarakat di Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi meliputi faktor pendukung berupa antusias masyarakat, dukungan lembaga pendamping, serta komitmen selama pelaksanaan program. Sementara itu, faktor penghambat mencakup sistem dan kebijakan pengelolaan sampah organik oleh pemerintah setempat belum optimal, dan keterbatasan sumber daya, terutama dari aspek anggaran dalam operasional penjemputan sampah, serta komitmen melaksanakan program secara berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi suatu program.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan masyarakat benar-benar mencapai tahap kemandirian dan keberlanjutan. Pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup dan WALHI Sumatera Barat sebagai lembaga pendamping diharapkan dapat terus mendukung penguatan kapasitas teknis, kelembagaan, dan manajerial kelompok pengelola *urban farming* agar program dapat berjalan stabil dan memberikan manfaat jangka panjang.
2. Perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya, khususnya anggaran dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat agar hambatan dalam implementasi program dapat diminimalkan dan faktor pendukung dapat dioptimalkan.

